

**PENTINGNYA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI UNTUK
MENDUKUNG INDONESIA MAJU**

Jeane Felice Eileen

Universitas Bandar Lampung, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Email: jfeileen15@gmail.com

ABSTRACT

Corruption has been one of the main challenges for Indonesia in recent years. Although various efforts have been made to eradicate corruption, these actions are still frequent in various government and private sectors. Corruption not only harms the state and society, but also hinders development. Therefore, to realize an Advanced Indonesia, an effective way is needed to overcome corruption that has become widespread. Anti-Corruption Education is considered one of the best solutions that must be implemented by the government. With Anti-Corruption Education required at all levels of education, including universities, students as the younger generation will be aware of the adverse effects of corruption and instill anti-corruption values from an early age. With this knowledge, Indonesia can become a developed country in the future.

Keywords: Corruption; Anti-Corruption; Education; Developed Countries; University.

ABSTRAK

Korupsi telah menjadi salah satu tantangan utama bagi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, tindakan ini masih sering terjadi di berbagai sektor pemerintahan dan swasta. Korupsi tidak hanya merugikan negara dan masyarakat, tetapi juga menghambat pembangunan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia Maju, diperlukan cara yang efektif untuk mengatasi korupsi yang sudah meluas. Pendidikan Anti

Article History

Received: December 2024

Reviewed: December 2024

Published: December 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Sindoro



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Korupsi dianggap sebagai salah satu solusi terbaik yang harus diterapkan oleh pemerintah. Dengan Pendidikan Anti Korupsi yang diwajibkan di seluruh jenjang pendidikan, termasuk perguruan tinggi, siswa sebagai generasi muda akan menyadari dampak buruk korupsi dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Dengan pengetahuan ini, Indonesia dapat menjadi negara maju di masa depan.

Kata Kunci: Korupsi; Pendidikan; Anti Korupsi; Negara Maju; Perguruan Tinggi.

I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan penyalahgunaan uang negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Kegiatan yang termasuk tindakan korupsi dapat berupa penyuapan, penjualan kekuasaan dan penggelapan. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, korupsi adalah setiap orang melanggar hukum dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak moralitas dan etika dalam menjalankan pemerintahan serta menghambat pembangunan bangsa dan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, korupsi telah menjadi masalah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, anggota legislatif, hingga pengusaha besar terus bermunculan, yang menandakan korupsi ini telah menyebar dan melibatkan banyak pihak.

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai apa itu korupsi menjadi salah satu penyebab banyaknya tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia. Banyaknya masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dampak negatif dari tindakan korupsi ini menjadi salah satu penghambat Indonesia menjadi Negara Maju. Selain itu, banyak mahasiswa yang masih kurang peduli akan pentingnya nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari dan untuk masa depan mereka. Jika banyak mahasiswa yang menunjukkan ketidakpedulian akan dampak negatif dari tindakan korupsi yang ada di Indonesia, maka tindakan korupsi yang ada di Indonesia akan semakin menjamur di masa yang akan datang sehingga akan semakin menghambat Indonesia menjadi negara maju.

Kurangnya praktik pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi juga menjadi hambatan bagi mahasiswa untuk dapat menumbuhkan sikap antikorupsi, karena pengetahuan tentang pendidikan anti korupsi yang masih kurang. Selain itu, kurangnya pengajar yang kompeten dan berpengalaman dalam bidang antikorupsi. Kurangnya fasilitas yang mendukung pembelajaran antikorupsi juga menjadi penyebab menjamurnya

tindakan korupsi di Indonesia, seperti perpustakaan yang lengkap dengan bahan bacaan terkait.

Salah satu faktor yang memperparah maraknya korupsi di Indonesia adalah kurangnya penegakan hukum. Para pelaku korupsi sering kali tidak mendapat hukuman yang setimpal, sehingga mereka tidak jera dan terus mengulangi perbuatannya. Selain itu, sistem hukum yang lemah dan rentan terhadap intervensi politik juga menghambat upaya pemberantasan korupsi. Korupsi menjadi penghalang bagi pembangunan bangsa, karena anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik justru disalahgunakan.

Maraknya korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang besar, tetapi juga berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi tujuan penting yang harus terus diperhatikan oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Maka dari itu, dengan adanya pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi maka mahasiswa akan memiliki pengetahuan anti korupsi dan menjadi pribadi yang anti korupsi yang dapat menciptakan Indonesia Maju di masa yang akan datang.¹

II. PERMASALAHAN

Merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan, artikel ini mengangkat isu utama mengenai sejauh mana pendidikan anti korupsi di institusi pendidikan tinggi dapat berfungsi sebagai solusi optimal untuk mewujudkan visi Indonesia maju yang bebas dari korupsi.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam studi ini melibatkan studi pustaka dengan membaca artikel-artikel karya Bapak Zainudin Hasan. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui wawancara dengan Jeane Faustine Earlene, seorang mahasiswa aktif di Universitas Bandar Lampung.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi merupakan perilaku yang sudah menjadi budaya dan fenomena ini umum dijumpai di masyarakat.² Menurut Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan seperti penggelapan dana, menerima suap, dan tindakan serupa lainnya. Secara umum, tindak pidana korupsi

¹ Tri Anggoro Mukti. 2018. *Mendorong Penerapan Pendidikan AntiKorupsi Di Perguruan Tinggi*. Perspektif Hukum. Surabaya. Hlm. 19.

² Dhevy Setya Wibawa, Murniati Agustian, M Tri Warmiyati. 2021. *Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif*. MUQODDIMA Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi. Hlm. 1.

melibatkan penggunaan kekuasaan oleh pegawai negeri atau aparatur sipil negara secara tidak sah untuk keuntungan pribadi atau pihak lain. Tindakan korupsi di tempat kerja sering kali menjadi kebiasaan yang sulit diberantas. Sejak era reformasi dimulai pada tahun 1998, tuntutan untuk demokratisasi serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin menguat. Namun, upaya pemerintah dalam menangani masalah korupsi hingga kini belum menunjukkan hasil yang memadai.³

Menurut Syed Hussein Alatas, sosiolog ternama asal Malaysia, korupsi dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan bentuk dan karakteristiknya. Menurut Syed Hussein Alatas, ada beberapa jenis korupsi sebagai berikut:

1. Korupsi Transaksional, merupakan jenis korupsi dimana terjadi kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang masing-masing mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut lainnya.⁴ Biasanya melibatkan pemberi dan penerima suap, dimana kedua belah pihak sepakat untuk melanggar hukum atau etika demi keuntungan pribadi.
2. Korupsi Luar Biasa, dalam korupsi ini, partai politik yang berkuasa memaksa pihak lain untuk memberikan sesuatu, misalnya uang atau jasa, dengan imbalan menghindari kerugian.
3. Korupsi Investasi, korupsi ini terjadi ketika seseorang memberikan suap atau keuntungan kepada pejabat publik dengan harapan mendapat keuntungan di kemudian hari yang merupakan "investasi" untuk keuntungan pribadi di masa depan.
4. Korupsi Nepotisme, Korupsi nepotisme terjadi ketika pejabat publik menggunakan kekuasaannya untuk memberikan tunjangan atau jabatan kepada anggota keluarga, teman dekat, atau kolega yang tidak sesuai dengan kemampuan atau kualifikasinya.
5. Korupsi Defensif, Korupsi defensif terjadi ketika seseorang merasa terpaksa memberikan suap atau keuntungan untuk melindungi dirinya dari tekanan, intimidasi, atau intimidasi dari pihak berwenang. Hal ini sering dianggap sebagai korupsi untuk mempertahankan diri.
6. Korupsi Spontan, Korupsi jenis ini terjadi secara spontan dan dilakukan oleh pejabat atau perseorangan tanpa adanya tekanan dari luar. Mereka terlibat dalam korupsi melalui inisiatif pribadi dan dorongan untuk menyalahgunakan jabatan mereka.
7. Korupsi Pendukung, Korupsi yang terjadi untuk mendukung atau memperkuat tindakan korupsi lainnya. Mereka biasanya adalah orang-orang yang secara tidak langsung terlibat dalam tindakan korupsi, namun membantu pelaku utama dengan cara tertentu dengan menutup-nutupi tindakan korupsi.

³ Zainudin Hasan. 2022. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung SMPN 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara*. Sol Justicia. Hlm.

⁴ Zainudin Hasan. 2021. *Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya*. Iblam Law Review. Hlm. 6.

Penyebab Korupsi Korupsi biasanya disebabkan oleh berbagai faktor struktural dan individual seperti:

1. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas: Karena lemahnya kontrol atas tindakan pejabat publik atau kurangnya sistem yang tepat untuk melaporkan tindak pidana korupsi.
2. Budaya Korupsi: Di beberapa negara dan organisasi, korupsi merupakan hal yang lazim dan dianggap dapat diterima atau normal oleh masyarakat.
3. Ketimpangan Ekonomi: Ketimpangan sosial dan ekonomi mendorong individu mencari jalan pintas untuk meraih keuntungan pribadi.
4. Sistem hukum yang lemah: Ketika lembaga hukum tidak mampu menegakkan hukum secara efektif, praktik korupsi akan lebih mudah terjadi tanpa konsekuensi yang serius.
5. Kurangnya insentif positif: Jika pegawai negeri dan pegawai negeri tidak menerima gaji yang adil, mereka mungkin lebih rentan terhadap suap.

Peneliti Donald R. Cressey memperkenalkan teori lain tentang penyebab korupsi, yang dikenal dengan Teori Fraud Triangle (TFT). Teori ini muncul setelah Cressey melakukan wawancara selama lima bulan dengan 250 terpidana korupsi. Dalam kerangka teori ini, terdapat tiga tahapan krusial yang dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan korupsi: tekanan, peluang, dan rasionalisasi.

1. Yang pertama adalah seseorang termotivasi untuk melakukan korupsi karena tekanan: Misalnya saja motif finansial yang bisa menjadi pemicunya. Namun Cressey mengatakan terkadang tekanan itu sebenarnya tidak ada. Sekadar berpikir bahwa seseorang sedang ditekan atau tergoda oleh bayangan suatu insentif sudah cukup untuk memuaskan pemicu pertama ini.
2. Yang kedua adalah sebuah kesempatan: Contoh paling nyata adalah lemahnya sistem regulasi yang menciptakan peluang terjadinya korupsi. Menurut Cressey, korupsi tidak bisa dilakukan tanpa adanya peluang.
3. Yang ketiga adalah rasionalisasi: MCressey mencatat, pelaku selalu memiliki rasionalisasi atau rasionalisasi atas tindakan korupsinya. Melalui rasionalisasi ini, setidaknya perasaan bersalah pelaku, seperti "Saya melakukan korupsi karena gaji saya tidak dibayar sebagaimana mestinya," atau "Keuntungan perusahaan sangat besar, tetapi tidak dibagikan secara adil".

Korupsi mempunyai dampak yang sangat merugikan yaitu:

1. Ekonomi:
Korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap ekonomi, baik dalam skala mikro maupun makro. Beberapa dampak ekonomi yang utama akibat korupsi seperti:

- a. Penghambatan Pertumbuhan Ekonomi, korupsi menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap stabilitas ekonomi. Investor enggan menanam modal di negara atau wilayah yang terkenal akan tingkat korupsinya yang tinggi karena takut menghadapi biaya-biaya tersembunyi, penggelapan, atau manipulasi dalam proses bisnis.
 - b. Pemborosan Sumber Daya, korupsi menyebabkan alokasi anggaran negara yang tidak efisien. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat malah disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya uang tersebut malah dialokasikan ke banyak proyek yang sebenarnya kurang bermanfaat bagi masyarakat.
 - c. Meningkatkan Biaya Bisnis, korupsi dalam bentuk suap menambah biaya operasional bagi perusahaan. Perusahaan harus mengeluarkan dana tambahan untuk mendapatkan izin, kontrak, atau kemudahan birokrasi, yang mengakibatkan ketidakefisienan dalam produksi dan meningkatkan biaya produk atau layanan. Ini membuat harga barang dan jasa lebih mahal dan membebani konsumen.
 - d. Mengurangi Daya Saing Ekonomi, korupsi dapat membuat daya saing suatu negara atau sektor ekonomi menurun karena keputusan bisnis dan kebijakan ekonomi sering kali dibuat berdasarkan hubungan pribadi, suap, atau nepotisme daripada pada kepentingan umum dan efisiensi.
 - e. Memperbesar Kesenjangan Sosial, korupsi cenderung memperparah ketidaksetaraan perekonomian di Indonesia. Sumber daya dan kekayaan lebih banyak terkonsentrasi di tangan mereka yang memiliki akses kekuasaan ke jaringan korupsi, sedangkan kelompok masyarakat miskin semakin miskin. Dengan berkurangnya akses terhadap pelayanan publik yang berkualitas, masyarakat miskin lebih sulit keluar dari kemiskinan, yang menyebabkan kesenjangan sosial semakin melebar.
2. Sosial: Korupsi meningkatkan kesenjangan sosial, mengurangi akses masyarakat miskin terhadap layanan publik, dan menyebabkan distribusi sumber daya yang tidak merata. Dari sisi sosial ekonomi, korupsi mengakibatkan harga barang pokok melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh masyarakat sehingga menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah.⁵
 3. Politik: Korupsi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi politik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan demokrasi dan menyebabkan ketidakstabilan politik.

⁵ Siful Arifin. 2015. *Model Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Islam*. Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman. Hlm. 9.

4. Lingkungan: Dalam beberapa kasus, korupsi memungkinkan terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara ilegal dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Beberapa dampak lingkungan yang disebabkan oleh korupsi seperti :
 - a. Eksploitasi Sumber Daya Alam yang Berlebihan: Korupsi sering kali terjadi dalam bentuk penyuapan untuk mendapatkan izin eksploitasi sumber daya alam secara ilegal atau tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan.
 - b. Penghancuran Hutan: Pejabat yang korup bisa memberikan izin penebangan liar atau alih fungsi lahan untuk kepentingan komersial, seperti perkebunan kelapa sawit. Hal ini menyebabkan deforestasi yang luas, mengancam keanekaragaman hayati, mempercepat perubahan iklim, dan mengganggu kehidupan masyarakat adat yang bergantung pada hutan.
 - c. Pencemaran Lingkungan: Industri yang tidak mematuhi aturan lingkungan sering kali membayar suap kepada pejabat untuk menghindari pengawasan atau sanksi hukum. Akibatnya, limbah berbahaya dibuang secara ilegal ke sungai, laut, atau tanah, yang menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara, serta membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
 - d. Pengelolaan Sampah yang Buruk: Di beberapa kota, dana yang seharusnya dialokasikan untuk sistem pengelolaan sampah yang efektif sering kali disalahgunakan oleh pejabat yang korupsi. Hal ini menyebabkan buruknya pengelolaan sampah dan pencemaran lingkungan akibat penumpukan sampah yang tidak terkendali.
 - e. Perusakan Ekosistem Laut: Korupsi dalam pemberian izin penangkapan ikan dan kegiatan maritim lainnya sering menyebabkan penangkapan ikan berlebihan (overfishing), pengambilan terumbu karang, dan kerusakan habitat laut. Hal ini merusak ekosistem laut yang penting untuk keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya laut.

Dengan demikian, korupsi tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga secara langsung berdampak negatif pada kelestarian lingkungan, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Berikut beberapa strategi pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Strategi yang umum dibahas meliputi:

1. Reformasi kelembagaan: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga-lembaga publik. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan e-Government, yang mengurangi interaksi langsung antara warga negara dan pejabat dalam proses administrasi.
2. Pendidikan antikorupsi: Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif korupsi dan pentingnya integritas melalui pendidikan sekolah, kampanye publik, dan program pelatihan.

3. Penegakan hukum yang kuat: Memperkuat institusi antikorupsi dan sistem peradilan untuk memastikan bahwa praktik korupsi mendapat hukuman yang setimpal. Hukuman yang ketat, seperti penyitaan aset dan hukuman penjara, dapat memberikan efek jera bagi para koruptor.
4. Kerjasama Internasional: Korupsi seringkali melibatkan aliran dana lintas batas negara. Oleh karena itu, kerjasama antar negara, misalnya melalui perjanjian antikorupsi seperti Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), sangat penting untuk memerangi korupsi di tingkat global.
5. Penguatan Pelapor: Melindungi pelapor korup (whistleblower) agar berani melaporkan praktik korupsi tanpa rasa takut akan pembalasan.

Menurut Hasil wawancara dengan salah satu mahasiswi Universitas Bandar Lampung, Jeane Faustine Earlene mengatakan bahwa mata kuliah pendidikan anti korupsi ini sangat bagus untuk membentuk karakter kita sejak dini agar kita dapat mengerti bahwa korupsi itu merupakan tantangan bagi kita ke depannya dan harus dihindari karena hal tersebut merugikan banyak pihak. Dan juga mata kuliah anti korupsi ini membantu mengurangi tindak korupsi di Indonesia untuk ke depannya sehingga tindak korupsi di Indonesia bisa berkurang dengan adanya kesadaran dari masing-masing-masing individu. Pendidikan anti korupsi memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan Indonesia, karena korupsi merupakan salah satu hambatan terbesar dalam pembangunan bangsa. Korupsi menyebabkan berkurangnya integritas lembaga pemerintahan, mengurangi efisiensi alokasi sumber daya, dan juga menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat. Untuk menciptakan Indonesia yang maju, maka pemerintah perlu membangun fondasi kepribadian dan integritas yang kuat melalui pendidikan anti korupsi, yang dimulai dari lingkungan keluarga hingga ke universitas. Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi bertujuan untuk memberikan pengetahuan pengetahuan bagi mahasiswa tentang apa itu korupsi dan pencegahannya.⁶ Dalam jangka panjang, pendidikan anti korupsi ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya anti terhadap korupsi di kalangan mahasiswa serta mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dalam memberantas tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia.

Pendidikan merupakan wadah untuk mengembangkan potensi manusia untuk meningkatkan kecerdasan sesuai dengan UUD 1945.⁷ Salah satu sarana pendidikan yang diajarkan adalah pendidikan antikorupsi. Hal ini mengacu pada langkah pengelolaan sistem pendidikan nasional untuk mengembangkan budaya antikorupsi pada seluruh

⁶ Yusrianto Kadir. 2018. *Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi*. Gorontalo Law Review. Hlm. 27.

⁷ Zainudin Hasan. 2024. *Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa*. Journal of Accounting Law Communication and Technology. Hlm. 1.

sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Yang sejalan dengan visi dan misi pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Pendidikan Anti Korupsi berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai moral, integritas dan rasa tanggung jawab pada generasi muda. Dengan meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi sejak dini, masyarakat dapat tumbuh dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab, transparansi, dan tata kelola yang baik. Hal ini juga berkontribusi dalam membangun budaya antikorupsi di semua bidang kehidupan, termasuk pemerintahan, bisnis, dan juga masyarakat. Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi ini bertujuan untuk melatih karakter mahasiswa yang menolak tindakan korupsi dan membangun semangat generasi muda bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸

Pendidikan anti-korupsi memiliki banyak manfaat yang berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari pendidikan anti-korupsi:

1. Meningkatkan Kesadaran Publik, Pendidikan anti-korupsi meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak buruk korupsi. Masyarakat yang terdidik lebih memahami bagaimana korupsi merugikan ekonomi, politik, dan kehidupan sosial mereka. Kesadaran ini membuat mereka lebih peka terhadap praktik-praktik korupsi di sekitar mereka dan lebih berani untuk melaporkannya.
2. Mengubah Pola Pikir dan Nilai-Nilai dalam Masyarakat, Dengan adanya pendidikan anti-korupsi, pola pikir masyarakat dapat berubah untuk mengutamakan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Nilai-nilai anti-korupsi seperti kejujuran, etika, dan keadilan dapat menjadi bagian dari budaya masyarakat, menggantikan mentalitas permisif terhadap korupsi yang mungkin sudah mengakar.
3. Membangun Generasi yang Berintegritas, Pendidikan anti-korupsi yang diterapkan di sekolah dan perguruan tinggi membantu membentuk generasi muda yang lebih berintegritas. Anak-anak dan remaja yang dibekali dengan nilai-nilai antikorupsi sejak dini cenderung tumbuh menjadi individu yang menolak korupsi dan lebih bertanggung jawab dalam peran publik atau pribadi mereka.
4. Meningkatkan Kualitas Pemerintahan, Ketika lebih banyak individu yang memiliki pemahaman dan kesadaran akan bahaya korupsi masuk ke dalam sistem pemerintahan, kualitas pemerintahan dapat meningkat. Pejabat publik yang terdidik dalam bidang antikorupsi lebih mungkin untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga membantu menciptakan birokrasi yang bersih dan efisien.

⁸ M Faadhilah Suhandi, Sulistia Agustin. 2023. *Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Perguruan Tinggi*. Sanskara Pendidikan dan Pengajaran. Hlm. 27.

5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat, Pendidikan anti-korupsi dapat memotivasi masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan pemerintahan dan kebijakan publik. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang mekanisme hukum dan hak-hak mereka, masyarakat dapat menjadi pengawas yang efektif terhadap korupsi, termasuk melalui pemantauan anggaran dan pelaporan penyimpangan.
6. Mendorong Pembangunan Berkelanjutan, Korupsi sering kali menghambat pembangunan dengan mengalihkan sumber daya yang merupakan kebutuhan publik. Dengan mengurangi korupsi melalui pendidikan, sumber daya bisa digunakan lebih efektif untuk membangun infrastruktur, memperbaiki layanan publik, dan memajukan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.
7. Korupsi di Masa Depan, Pendidikan anti-korupsi berfungsi sebagai pencegahan jangka panjang terhadap praktik-praktik korupsi. Dengan membentuk sikap dan perilaku yang antikorupsi di masyarakat, pendidikan ini membantu menciptakan lingkungan sosial yang tidak mendukung korupsi, sehingga mencegah terjadinya tindakan korupsi di masa depan.
8. Meningkatkan Citra dan Kepercayaan Publik, Pendidikan anti-korupsi dapat membantu memulihkan citra institusi pemerintah, perusahaan, dan organisasi lainnya. Dengan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut meningkat. Hal ini dapat memperbaiki reputasi negara di tingkat internasional, meningkatkan daya tarik bagi investor asing, dan memperkuat legitimasi politik.
9. Menumbuhkan Etos Kerja yang Baik di Dunia Usaha, Dalam sektor swasta, pendidikan anti-korupsi membantu membangun etos kerja yang etis dan profesional. Perusahaan yang mendukung nilai-nilai anti-korupsi akan mendorong persaingan yang sehat, menjaga integritas dalam bisnis, dan menghindari suap atau praktik ilegal lainnya yang merugikan ekonomi secara keseluruhan.
10. Menciptakan Keadilan Sosial, Korupsi sering kali memperburuk ketidakadilan sosial dengan memberikan keuntungan tidak sah kepada orang yang berkuasa. Pendidikan anti-korupsi membantu menciptakan lingkungan di mana aturan hukum ditegakkan, sehingga semua orang, terutama mereka yang kurang mampu, memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan.

Menurut narasumber pendidikan anti korupsi ini dapat membantu kemajuan Indonesia dengan mengurangi tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia dengan begitu perekonomian yang ada di Indonesia juga akan meningkat. Korupsi sudah lama menjadi salah satu hambatan untuk pembangunan dan pertumbuhan terbesar di Indonesia untuk menjadi Negara Maju. Oleh karena itu pendidikan yang menanamkan nilai-nilai anti korupsi sampai ke perguruan tinggi sangat penting untuk membentuk generasi muda yang berintegritas, bersikap transparan, dan bertanggung jawab.

Berikut adalah beberapa peran penting pendidikan anti-korupsi di perguruan tinggi dalam mencapai Indonesia Maju:

1. **Membangun Kesadaran Masyarakat:** Pendidikan anti-korupsi menanamkan pemahaman tentang bahaya korupsi bagi masyarakat dan negara. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat akan lebih peka terhadap tindakan korupsi dan lebih siap menolaknya.
2. **Menciptakan Generasi Berintegritas:** Melalui pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai moral dan etika, mahasiswa selaku generasi muda diajarkan pentingnya integritas. Karena generasi muda inilah yang akan menjadi pemimpin yang jujur, adil, dan bertanggung jawab di masa yang akan datang.
3. **Menanamkan Nilai Anti-Korupsi dalam Sistem Pendidikan:** Memasukkan materi anti-korupsi ke dalam mata kuliah di perguruan tinggi dapat membiasakan mahasiswa untuk dapat memahami dampak negatif korupsi, serta mengembangkan sikap anti terhadap tindakan korupsi.
4. **Mengurangi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi:** Dengan memerangi korupsi, pemerintah bisa mengalokasikan sumber daya dan anggaran dengan lebih efektif. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi yang lebih merata.
5. **Mendukung Reformasi Birokrasi:** Pendidikan anti-korupsi mendorong terciptanya tata kelola yang baik dalam pemerintahan. Aparatur negara yang terdidik dan berintegritas akan lebih tahan terhadap godaan untuk melakukan korupsi.
6. **Membangun Kepercayaan Publik:** Ketika korupsi berkurang, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik meningkat. Hal ini sangat penting untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan politik.

Untuk membangun budaya anti-korupsi yang kokoh, pendidikan anti-korupsi perlu melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk sekolah, keluarga, universitas, dan lembaga pemerintahan. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan kemajuan melalui pemerintahan yang bersih dan pembangunan yang berkelanjutan.

V. KESIMPULAN

Pendidikan Anti-Korupsi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung upaya Indonesia untuk menjadi negara maju. Korupsi telah lama menjadi salah satu penghambat utama pembangunan di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial. Ketika korupsi terjadi, sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan bangsa sering kali disalahgunakan, sehingga memperlambat proses pembangunan dan menghambat kemajuan negara. Oleh karena itu, Pendidikan Anti-Korupsi menjadi strategi jangka panjang yang sangat diperlukan untuk membangun masyarakat yang berintegritas, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan adanya mata kuliah pendidikan anti korupsi ini juga menyadarkan mahasiswa bahwa tindakan sekecil apapun yang merugikan orang lain juga termasuk korupsi dan menyadarkan akan dampak buruk korupsi bagi bangsa dan negara kita ke depannya. Melalui Pendidikan Anti-Korupsi yang ada di perguruan tinggi, generasi muda dapat dibekali dengan pemahaman mendalam tentang bahaya korupsi, tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan negara. Pendidikan ini menanamkan nilai-nilai moral yang kuat, seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan rasa kepedulian terhadap kepentingan publik. Dengan memasukkan Pendidikan Anti-korupsi sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi, Indonesia dapat menciptakan generasi penerus yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya etika dan tata kelola yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Generasi ini kelak akan menjadi pemimpin yang memiliki komitmen untuk berperang melawan korupsi dan menjaga keseimbangan di berbagai bidang.

Pendidikan anti korupsi juga membantu menciptakan iklim sosial yang kondusif, di mana tindakan korupsi tidak lagi dianggap sebagai hal yang biasa atau dapat ditoleransi. Ketika masyarakat, terutama kaum muda, memiliki pemahaman yang kuat tentang dampak negatif korupsi, mereka akan lebih kritis dan berani dalam melawan segala bentuk penyimpangan. Kesadaran kolektif ini sangat penting dalam membangun budaya anti-korupsi yang kuat dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, bukan hanya mahasiswa akan tetapi masyarakat juga akan semakin aktif terlibat dalam pengawasan terhadap kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Dan dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat yang anti terhadap korupsi melalui perguruan tinggi ini akan mendukung Indonesia Maju yang terbebas dari korupsi di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhevy Setya Wibawa, Murniati Agustian, M Tri Warmiyati. 2021. *Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif*. MUQODDIMA Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi. Hlm. 1.
- M Faadhilah Suhandi, Sulistia Agustin. 2023. *Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Perguruan Tinggi*. Sanskara Pendidikan dan Pengajaran. Hlm. 27.
- Siful Arifin. 2015. *Model Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Islam*. Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman. Hlm. 9.
- Tri Anggoro Mukhti. 2018. *Mendorong Penerapan Pendidikan AntiKorupsi Di Perguruan Tinggi. Perspektif Hukum*. Surabaya. Hlm. 19.
- Yusrianto Kadir. 2018. *Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi*. Gorontalo Law Review. Hlm. 27.
- Zainudin Hasan. 2022. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung SMPN 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara*. Sol Justicia. Hlm. 1.
- Zainudin Hasan. 2021. *Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (Apbk) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya*. Iblam Law Review. Hlm. 6.
- Zainudin Hasan. 2024. *Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa*. Journal of Accounting Law Communication and Technology. Hlm. 1.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.